BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara tidak dapat berdiri sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan negara lain. Hal tersebut sesuai dengan adanya hukum internasional yang didasarkan atas pemikiran bahwa adanya masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara yang merdeka, sederajat dan berdaulat. Kehidupan negara-negara itu mempunyai hubungan saling ketergantungan satu sama lain. Sehingga terjadilah suatu interaksi, melalui interaksi ini akan terjadi suatu pola hubungan yaitu hubungan internasional. Pola hubungan tersebut dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertentangan, tapi yang diharapkan tentunya adalah pola-pola kerjasama.

Kerjasama ini ada 3 kategori, yang pertama adalah kerjasama bilateral, kedua multilateral, dan ketiga adalah kerjasama regional. Begitu juga dengan negara Indonesia melaksanakan kerjasama internasional dalam berbagai bidang, baik dalam ruang lingkup bilateral, regional, maupun multilateral.

Masalah-masalah yang dialami suatu negara belum tentu bisa diatasi sendiri tetapi akan melibatkan banyak negara untuk merasa ikut bertindak dan membantu memecahkannya karena mereka menganggap bahwa masalah itu sudah menjadi bagian dari masalah global. Sebagai contoh adanya berbagai konflik didunia yang meluas seperti konlik dinegara-negara Balkan, konflik

berkepanjangan di Palestina dan negara Suriah yang masih perlu penanganan dari masyarakat internasional.

Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat internasional yang kemudian bergabung dalam wadah organisasi internasional memegang peranan dalam menyelesaikan masalah antar bangsa tersebut. Organisasi internasional yang memegang peranan dalam menyelesaikan masalah antar bangsa antarbangsa tersebut, dalam kaitan ini adalah Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Harapannya adalah bahwa PBB akan menjadi kekuatan politik yang tidak terpengaruh yang siap mencegah dan meredam berbagai permasalahan yang telah ada.

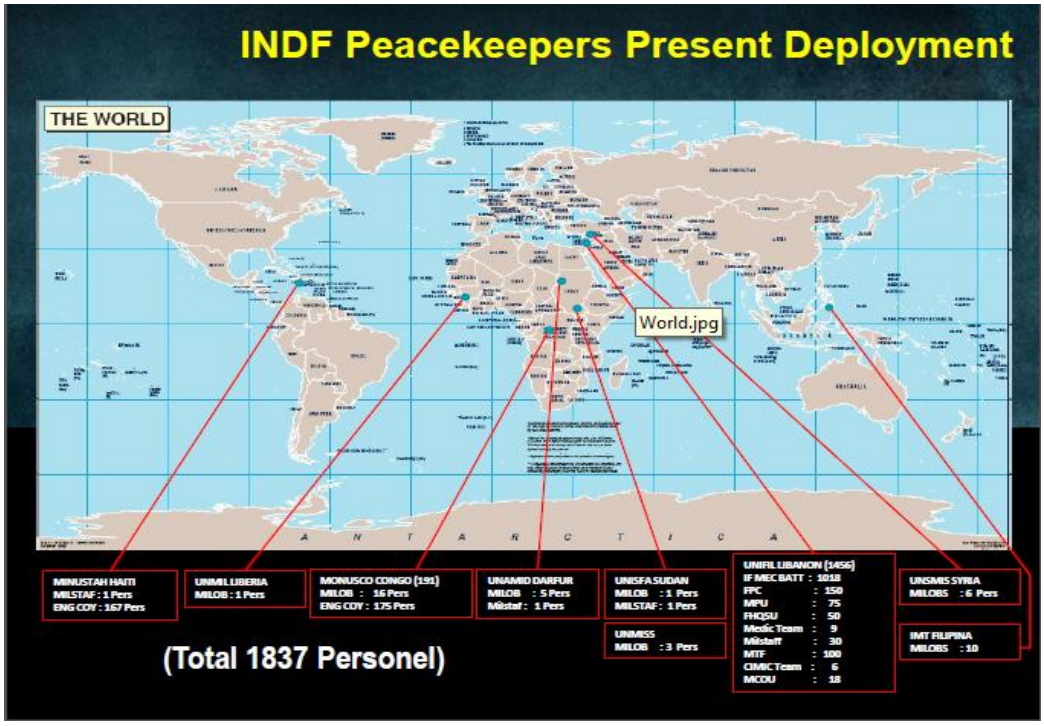
Sebagai salah satu wujud nyata keterlibatan PBB dalam mencegah atau meredam permasalahan atau konflik yang terjadi antar negara dan sebagai bukti bahwa PBB adalah organisasi yang bersifat netral, maka dibentuklah Pasukan Perdamaian PBB pada tahun 1948 yang terdiri dari negara - negara kontributor dari seluruh dunia yang dikirim untuk membantu menyelesaikan konflik di negara-negara yang bersangkutan. Salah satu negara kontributor Pasukan Perdamaian PBB adalah Indonesia.

Selanjutnya dalam hubungan regional dan internasional, Indonesia berperan aktif sebagai negara kontributor pasukan penjaga perdamaian dunia (PBB). Indonesia mempunyai sejarah panjang dan secara berkala mengirimkan tentara dibawah bendera PBB sejak tahun 1957 sampai dengan sekarang.

Data per 31 Maret 2013, tercatat sekitar 92.541 personil baik militer, polisi, maupun sipil yang berpartisipasi di 14 misi. Saat ini, PBB menghadapi

tantangan dalam menutup gap antara *supply* dan *demand* dalam berbagai misi penjaga perdamaian (deplu.go.id, diunduh 17 Mei 2013).

Gambar 1.1. INDF *Present Deployment*



Gambar diatas menunjukan jumlah pasukan perdamaian Indonesia yang telah dan masih menjalankan misi perdamaian PBB diseluruh dunia dengan total jumlah pasukan sebesar 1837 personel. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia konsisten dan peran aktifnya menjalankan perdamaian dunia. Diharapkan ditahun-tahun yang akan mendatang jumlah tersebut akan terus meningkat dan diimbangi dengan kualitas pasukan perdamaian Indonesia yang dikirim seperti kemampuan *hard skills (tactical and survival skills)* dan *soft skills* (kemampuan beradaptasi dengan budaya dan bahasa). Bahasa Inggris saat ini jadi faktor penting bagi tentara bersenjata dalam menghadapi tantangan global, khususnya mereka yang

terlibat dalam proyek internasional seperti misi perdamaian di bawah bendera PBB.

Selain berperan aktif sebagai pasukan penjaga perdamaian dunia (PBB), Indonesia juga aktif dan menjadi anggota dari *International Association of Peacekeeping Training Centre* (IAPTC). Organisasi ini bertujuan untuk menyatukan berbagai organisasi internasional, institusi, pusat pelatihan penjaga perdamaian, universitas-universitas, dan grup atau organisasi lainnya yang bergerak dalam bidang perdamaian. Sejak didirikan tahun 1995, telah bergabung 90 negara dan organisasi global yang tersebar diseluruh dunia (http://www.iaptc.org/about-iaptc/ diunduh tanggal 1 April, 2013).

Keterlibatan Indonesia dalam peran aktifnya menjaga perdamaian dunia telah dilegitimasi oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea Keempat yang berbunyi:

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (Pembukaan UUD 1945 Alinea 4).

Dari Pembukaan UUD 1945 mengandung penjelasan tentang fungsi negara yaitu; (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan

bangsa dan, (4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Negara Indonesia juga berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia untuk kepentingan bersama serta tunduk pada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB.

Selain Pembukaan UUD 1945, peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia juga dipertegas dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam Undang – Undang tersebut dikemukakan bahwa politik luar negeri diartikan sebagai kebijakan, sikap, langkah pemerintah republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Inti dari kedua asas hukum diatas adalah mempertegas asas politik negara yang dianut Indonesia, yaitu asas politik dalam negeri yang berkedaulatan rakyat, dan asas politik luar negeri yaitu bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Aktif artinya tidak pasif atas kejadian-kejadian internasional melainkan aktif menjalankan kebijakan luar negeri dengan cara berperan serta menjaga perdamaian dunia.

Indonesia kemudian memperkuat komitmennya terhadap PBB dengan meningkatkan kontribusinya terhadap misi penjaga perdamaian. Salah satu hal yang dilakukan Indonesia adalah dengan mendirikan *Indonesian National Defense*

Force Peacekeeping Center (INDF-PKC) atau dikenal sebagai Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) pada tahun 2011 yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bukit Setntul, Bogor - Jawa Barat.

Tugas pokok PMPP Indonesia adalah merencanakan dan menyiapkan personel TNI dalam penugasan, pelatihan dan pendidikan di dalam dan di luar negeri dalam ruang lingkup operasi pemeliharaan perdamaian. Sedangkan Fungsi PMPP TNI itu sendiri adalah :

1. Merumuskan, merencanakan, menyiapkan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengiriman dan penerimaan misi pemeliharaan perdamaian.
2. Menyelenggarakan kegiatan latihan serta memelihara kemampuan personel maupun satuan TNI yang dipersiapkan untuk operasi pemeliharaan perdamaian.
3. Merencanakan kebutuhan operasi, administrasi, dan logistik dalam rangka pelaksanaan latihan bagi personel dan satuan TNI yang disiapkan untuk melaksanakan operasi pemeliharaan perdamaian.

Diharapkan keberadaan INDF-PKC dapat menciptakan menciptakan sebuah sarana yang mengumpulkan keahlian perdamaian dan menyebarluaskan pengetahuan kepada praktisi baik dalam kawasan regional maupun internasional. Selain itu, wujud nyata program INDF PKC yang telah dilakukan pada tahun 2012, adalah sebagai berikut:

1. Dengan Kedutaan Inggris di menyediakan Laboratorium Bahasa Inggris dan Instruktur untuk INDF PKC.

2. Dengan GPOI USPACOM dalam melakukan Latihan Bersama, Kursus dan Konferensi Komandan PKC.
3. Instruktur Program Pertukaran dengan Kanada dan Australia.
4. Partisipasi siswa dalam berbagai kursus di Australia, Kanada, Nepal, Bangladesh, India, Mongolia, Malaysia, Italia.
5. Dengan Exchange Program Visit VIP UNDPKO, Irlandia, Finlandia. Norwegia, Australia, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Inggris, Nepal, Italia, Singapura, dan lain-lain.
6. Dengan Amerika Serikat dalam mengembangkan Akomodasi Troop di *Base New* PKC, Sentul-Bogor.

Keenam program diatas telah dilaksanakan pada tanggal 23 April sampai dengan Mei 2012. Event tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan ditutup oleh Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) Indonesia Brigadir Jenderal TNI Imam Eddy Mulyono. Event tersebut diharapkan memberikan manfaat yang positif bagi peserta yang sebagian besar merupakan perwira-perwira yang dipersiapkan untuk mengikuti misi pemeliharaan PBB dimasa yang akan datang (http://hankam.kompasiana.com/2012/05/04/pmpp-tni-siap-kirimkan-misi-ke-syria-459854.html Diunduh 16 April, 2013).

Sejak lama, Indonesia memang dikenal sebagai negara kontributor Pasukan Perdamaian PBB. Telah banyak pula hambatan yang dialami para personel Pasukan Perdamaian, diantaranya adalah hambatan dalam hal bahasa, hambatan dalam pelaksanaan prosedur operasi, dan pengetahuan global lainnya.

Bahasa merupakan sebuah prasarana yang paling penting dalam berkomunikasi. Seperti yang kita ketahui bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar yang digunakan untuk berkomunikasi secara internasional. Pada prakteknya, bahasa Inggris wajib dipelajari sebagai salah satu kurikulum wajib dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Bahasa Inggris telah menyatu dengan berbagai aspek dan berbagai lapisan tidak hanya dari sektor pendidikan, sosial ekonomi, kebudayaan, bahkan dari sektor militer pun memerlukan pengajaran bahasa Inggris.

Pelatihan Bahasa Inggris sangat penting untuk prajurit dan perwira sebelum penempatan, untuk meningkatkan sisi kooperatif dari pasukan internasional. Pelatihan Bahasa Inggris juga merupakan saluran utama untuk memberikan pelatihan dalam mengurangi permasalahan yang terjadi dilapangan. Sebagai contoh, adanya penterjemah bahasa *(interpreter)* pada misi perdamaian dunia PBB pada Satgas TNI Konga XXIII-C (Indobatt/*Indonesian Battalion*) yang sedang melaksanakan misi perdamaian UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*) - Lebanon Selatan yang dikirim pada tahun 2006 dan masih berjalan hingga 2013.

Penterjemah ini setiap hari bertugas membantu anggota Satgas yang sedang melaksanakan interaksi dengan masyarakat seperti dalam kegiatan patroli, *medical assistance*, *smart car*, *computer class* dan lain-lain. Interaksi yang dilakukan oleh para penterjemah dalam satgas peacekeeper dengan masyarakat Lebanon Selatan ini dilakukan dalam dua bahasa yaitu bahasa lokal (bahasa Arab)

dan bahasa Inggris (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/87114 diunduh tanggal 1 April, 2013).

Dapat dibayangkan bila pasukan perdamaian Indonesia tidak menguasai bahasa Inggris, maka mereka akan mengalami kesulitan berkomunikasi dalam berbagai aktivitas yang mereka lakukan, tidak hanya dengan warga lokal tetapi juga dengan rekan sejawat mereka dari negara lain. Maka dapat disimpulkan bahwa bahasa Inggris menjadi sangat vital keberadaannya dalam menujang kesuksesan suatu misi perdamaian karena seperti kita diketahui bahasa Inggris merupakan bahasa Internasional yang dipergunakan dalam penuturan komunikasi global.

Kendala terkait bahasa seperti dipaparkan diatas kemudian melatarbelakangi *Indonesian National Defense Force Peacekeeping Center* (INDF-PKC) untuk menjalin kerjasama bilateral dengan Kedutaan Besar Inggris di Indonesia dalam bentuk program *Peacekeeping English Project (PEP)*. Peran utama dari program ini adalah untuk memfasilitasi interoperabilitas pasukan penjaga misi perdamaian Indonesia dengan pasukan internasional lainnya pada misi PBB, dan untuk meningkatkan efektivitas operasi pendukung perdamaian.

Proyek pengajaran Bahasa Inggris *Peacekeeping English Project (PEP)* untuk Tentara Nasional Indonesia didirikan pada November 2012 dan berbasis di *Indonesian National Defense Force Peacekeeping Center* (INDF-PKC) di Bogor, Indonesia. Tujuan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung pembangunan Indonesia sebagai pusat regional untuk pelatihan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.

2. Untuk meningkatkan tingkat bahasa personil angkatan pertahanan Indonesia sehingga mereka dapat secara efektif berpartisipasi dalam operasi Penjaga Perdamaian PBB dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang mereka gunakan untuk bekerja.
3. Untuk membangun sistem pelatihan bahasa Inggris jangka panjang dan berkelanjutan dalam hubungannya dengan program Perdamaian dan Indonesia bisa membangun sekolah militer berbasis kebahasaan di seluruh negeri.
4. Untuk mengembangkan sistem pelatihan bahasa Inggris berdasarkan silabus khusus, fasilitas belajar dengan akses personal, sistem pengujian yang dirancang sedemikian rupa dan kesempatan untuk mendapatkan tingkat pelatihan kependidikan yang handal. (http://www.britishcouncil.org/indonesia-english-for-peacekeeping.htm diunduh tanggal 1 April, 2013).

Proyek pengajaran bahasa Inggris bagi tentara penjaga perdamaian ini, seperti kita ketahui adalah kelanjutan dari beberapa program kerjasama antara negara Indonesia dan negara Inggris. Kedua negara tersebut memiliki sejarah kerjasama bilateral yang panjang. Kerjasama keduanya sudah dimulai sejak tahun 1949 dimana negara Inggris membuka kedutaan besar di Indonesia, dan Indonesia juga membuka kedutaan besar di negara Inggris, tepatnya dikota London. Negara Inggris menganggap Indonesia sebagai partner global yang penting yang akan membawa hubungan bilateral yang sama-sama saling menguntungkan.

Kedua negara juga merupakan anggota dari organisasi G-20 yang bergerak dalam bidang ekonomi.

Setelah ketidakstabilan keamanan yang terjadi pada tahun 60'an, hubungan kerjasama antara Indonesia dan Inggris semakin meningkat. Karena pentingnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, pemerintah Indonesia telah mempromosikan pengajaran pendidikan bahasa Inggris disekolah-sekolah local sejak tahun 1970. *British council* sendiri telah ada di Indonesia sejak tahun 1948 yang bertujuan untuk mempromosikan kebudayaan Inggris di Indonesia yang menekankan pada area: kebahasaan, kesenian, pendidikan, dan sosial.

Beberapa bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Inggris yang telah dilakukan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2006, mantan perdana menteri Negara Inggris Tony Blair menemui Presiden Susilo-Bambang Yudhoyono dimana mereka membuat pertama kali mencetuskan kesepakatan kemitraan (*Partnership*) dengan tema "Membangun kemitraan regular Indonesia-Inggris, Forum yang ditengahi oleh Kementrian Luar Negeri untuk mempromosikan dialog strategi Bilateral, Multilateral dan Isu global. Forum Indonesia – Inggris pertama kali diadakan pada tahun 2007, diketuai oleh Menteri Luar Negeri Negara Inggris Margaret Beckett dan Menteri Luar Negeri Indonesia oleh Hassan Wirajuda.

Pada Bulan Maret 2010, *The House of Lords* yang merupakan dewan perwakilan Inggris, yang bertugas untuk membuat undang-undang dan mengawasi kegiatan pemerintahan, mengundang Indonesia karena prestasinya dalam

memajukan demokrasi sosial, kebebasan bermasyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan. Dalam pertemuan dengan anggota parlemen Hayono Isman, *The House of Lords* mengutarakan niat untuk berkerjasama lebih lanjut lagi diantara kedua negara.

Pada tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Inggris David Cameron menandatangani nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) di kantor sekaligus kediaman Cameron, di 10 Downing Street. Kerja sama yang disepakati itu adalah di bidang pertahanan, pendidikan, dan ekonomi kreatif.

Kerja sama bidang pertahanan ini ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Pertahanan Inggris Phillip Hammond, M.P. Kerja sama itu berupa bantuan peningkatan kapasitas bagi Tentara Nasional Indonesia di Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan dalam bentuk peralatan audio visual untuk pelatihan bahasa, juga menyediakan kursus-kursus dan seminar bagi anggota pasukan perdamaian.

Bentuk kerja sama di bidang pertahanan lainnya berupa kontrak penjualan alat-alat pertahanan kepada angkatan udara, angkatan darat, dan angkatan laut Indonesia. Peralatan itu di antaranya peluru kendali *starstreak*, senapan *sniper*,kapal perang kecil multiguna (*Multi Roles Light Frigate* – MLRF), dan suku cadang untuk pesawat tempur Hawk 109/209.

Dalam bidang industri dan ekonomi kreatif, kerjasama Indonesia dan Inggris telah disepakati oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Mari Elka Pangestu dan Menteri Industri Kreatif Inggris Ed Vaizey. Mari Elka

Pangestu mengatakan bahwa kesepakatan yang telah dibuat ini sangatlah penting bagi pengembangan industri kreatif di Indonesia karena Inggris adalah salah satu rujukan dunia industry Indonesia.

Kemudian di bidang pendidikan telah ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhammadu Nuh dengan Menteri Negara Universitas dan Sains Inggris David Willes. Muhammad Nuh mengatakan bahwa Inggrus ingin mengembangkan studi mengenai Indonesia di universitas-universitas di Inggris, seperti di Exeter, SOAS, dan Oxford, agar para ahli-ahli Indonesia asal Inggris akan lebih banyak. Selain itu, ada beasiswa studi di Inggris untuk 150 mahasiswa -mahasiswi Indonesia pertahun yang melengkapi beasiswa DIKTI.

Ketiga kesepakatan baik pertahanan, ekonomi kreatif, dan pendidikan telah resmi ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 1 November 2012 di Jalan Downing 10, London, Inggris. Ketiga kesepakatan tersebut termasuk dalam agenda Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya ke Inggris tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November 2012. Peningkatkan kerjasama antar kedua negara akan berlangsung dengan mengadakan pertemuan rutin minimal 2 tahun

(http://www.tempo.co/read/news/2012/11/02/078439318 diunduh 3 April, 2013).

Dari pemaparan diatas jelas sekali hubungan bilateral antara Indonesia dengan Inggris telah semakin erat dan berkembang. Hal diharapkan bisa membuat Indonesia memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan nasional yang ingin di raih.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Kerjasama Indonesia – Inggris Dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Pasukan Perdamaian Indonesia Untuk PBB Melalui Program Peacekeeping English Project ".**

Ketertarikan penulis terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa matakuliah pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, antara lain :

1. Pengantar Hubungan Internasional, mata kuliah ini membantu mempelajari bagaimana adanya interaksi antara *State Actor* (Negara) maupun *Non State Actor* (organisasi internasional, MNC, ataupun individu).
2. Politik Internasional, mata kuliah ini membantu memberikan gambaran mengenai hubungan pemerintahan suatu negara dengan negara lain yang didalamnya dilibatkan peranan aktor non-negara, terkait dalam memperjuangkan kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*)
3. Politik Luar Negeri RI, mata kuliah ini membantu mengetahui kebijakkan luar negeri Indonesia dengan negara lain.
4. HI di Eropa, mata kuliah ini membantu memberikan pengetahuan dan analisis mendalam mengenai perkembangan sistem internasional di Eropa khususnya setelah terjadinya perubahan mendasar di wilayah Eropa Timur pada sekitar tahun 90-an. Serta sejumlah prediksi mengenai perkembangan regionalisme di Eropa di masa mendatang (terutama pembentukan Uni Eropa) baik dari segi ekonomi, politik, maupun keamanan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Major :

"Bagaimana Prospek *Peacekeeping English Project (PEP)* dalam meningkatkan kemampuan bahasa inggris Pasukan Perdamaian Indonesia untuk PBB"

Rumusan Masalah Minor:

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merangkumnya dalam bentuk pertanyaan :

1. Faktor apa yang melatarbelakangi diadakannya program *Peacekeeping English Project* ?
2. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam menjalankan program *Peacekeeping English Project* dalam meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris Pasukan Perdamaian Indonesia untuk PBB ?
3. Apa saja kendala dalam dalam menjalankan program *Peacekeeping English Project* dalam meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris Pasukan Perdamaian Indonesia untuk PBB ?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dikarenakan luasnya permasalahan, maka berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di paparkan diatas, peneliti akan memusatkan pada hanya tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi program *Peacekeeping English Project* dan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan program *Peacekeeping English Project* ini dilaksanakan, dimulai dari dilaksanakannya

program ini November 2012 sampai 2013. Dikarenakan pada November 2012 perjanjian ini di tandatangani, tercapainya kerjasama dalam bentuk program *Peacekeeping English Project*, serta mulai berjalannya program ini.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peranan *Peacekeeping English Project (PEP)* dalam meningkatkan kemampuan bahasa inggris Pasukan Perdamaian Indonesia untuk PBB.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi diadakannya program *Peacekeeping English Project*.
2. Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan dalam menjalankan program *Peacekeeping English Project* dalam meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris Pasukan Perdamaian Indonesia untuk PBB.
3. Untuk mengetahui kendala dalam dalam menjalankan program peningkatan kemampuan Bahasa Inggris Pasukan Perdamaian Indonesia untuk PBB.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini ialah diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan yang lebih dalam mengenai kerjasama pertahanan dan keamanan, terutama tentang kerjasama Indonesia - Inggris melalui program *Peacekeeping English Project (PEP)* dan menambah wawasan yang lebih luas dalam usahanya meningkatkan kemampuan bahasa inggris Pasukan Perdamaian Indonesia untuk PBB.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penilitian ini secara praktis ialah diharapkan dapat menambah data-data dan tambahan informasi bagi para penstudi Hubungan Internasional dan masyarakat pada umumnya, mengenai kerjasama internasional serta pengaruhnya terhadap kehidupan negara-negara anggotanya khususnya dengan topik penelitian yang dibahas kali ini, dan dapat berguna juga bagi peneliti sendiri untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang permasalahan internasional.